



Penguatan Demokrasi Deliberatif Sebagai Bentuk *Civic Disposition*: (Studi SMK Negeri 2 Karanganyar)

Abdul Bari Fathoni¹, Muhammad Hendri Nuryadi², Moh. Muchtarom³, Anis Suryaningsih⁴

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: hendri@staff.uns.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 25 Maret 2026

ABSTRACT

Deliberative democracy emphasizes inclusive participation, rational dialogue, and equality in decision-making, which are relevant to the objectives of Civic Education. This study aims to analyze the strategies implemented by the Student Council (Organisasi Siswa Intra Sekolah/OSIS) in strengthening deliberative democratic practices as a form of civic disposition, as well as to identify factors that hinder their implementation. This research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and document analysis involving OSIS advisors, administrators, and members. Data analysis was conducted interactively through the stages of data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the strengthening of deliberative democracy is carried out through three main strategies: establishing organizational goals through openness in the review of the vision and mission as well as the selection of administrators, designing participatory work programs, and allocating school resources to support student involvement. These strategies contribute to the development of students' civic disposition, particularly in terms of civility in discussion, self-discipline, open-mindedness, and tolerance of diversity. However, the implementation still faces obstacles related to participation interest, including low levels of active student participation, power dominance manifested in the influence of seniority and hierarchical perceptions, and weak commitment to deliberative principles.

Keywords: *deliberative democracy, student council, civic disposition*

ABSTRAK

Demokrasi deliberatif menekankan partisipasi inklusif, dialog rasional, dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan yang relevan dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi OSIS dalam memperkuat praktik demokrasi deliberatif sebagai bentuk civic disposition serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen dengan melibatkan pembina OSIS, pengurus, dan anggota OSIS. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan demokrasi deliberatif dilakukan melalui tiga strategi, yaitu penetapan tujuan organisasi dengan adanya keterbukaan dalam peninjauan visi dan misi serta seleksi pengurus, penyusunan program kerja yang partisipatif, serta alokasi sumber daya sekolah untuk mendukung keterlibatan

siswa. Strategi tersebut berkontribusi pada pembentukan civic disposition siswa, terutama dalam aspek adab berdiskusi, disiplin diri, keterbukaan berpikir, dan toleransi terhadap keberagaman. Namun demikian, pada pelaksanaannya masih menghadapi kendala pada minat partisipasi berupa rendahnya partisipasi aktif siswa, dominasi kekuasaan berupa adanya pengaruh senioritas dan persepsi hierarki, dan pada komitmen deliberasi berupa adanya lemahnya komitmen terhadap prinsip deliberasi.

Kata Kunci: *Demokrasi Deliberatif, OSIS, Civic Disposition.*

PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan warga negara sebagai aktor penting dalam menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) memberikan landasan konstitusional mengenai kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat sebagai prasyarat partisipasi warga negara dalam kehidupan demokratis. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan demokrasi memerlukan keterlibatan aktif rakyat dalam praktiknya di kehidupan sehari-hari.

Demokrasi tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses yang berlangsung secara bertahap dan memerlukan pembiasaan serta dukungan lingkungan sosial. Ubaedillah dan Rozak (dalam Brahma, 2020, hlm. 62), menyatakan bahwa demokrasi merupakan proses yang dipengaruhi oleh kondisi sosial tempat warga negara hidup dan berinteraksi. Dalam konteks ini, pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter kewarganegaraan. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi mengembangkan kemampuan intelektual, tetapi juga membiasakan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi.

Siswa sebagai generasi penerus bangsa diharapkan berkembang menjadi warga negara muda yang cakap dan demokratis. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai demokrasi tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran di kelas, tetapi juga perlu diperkuat melalui kegiatan di luar kelas, khususnya kegiatan ekstrakurikuler. Melalui organisasi sekolah, siswa memperoleh kesempatan untuk belajar dan mempraktikkan diskusi serta musyawarah sebagai bentuk nyata pengalaman berdemokrasi. Sejalan dengan hal tersebut, Winarno menegaskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi dan membentuk karakter demokratis siswa (dalam Novitasari et al., 2023, hlm. 2242).

Partisipasi aktif siswa dalam organisasi mencerminkan penerapan demokrasi deliberatif, di mana siswa memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat, menyampaikan pendapat secara objektif, serta berpartisipasi tanpa tekanan atau dominasi pihak tertentu. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Muthhar (dalam Toha, 2024) yang menyatakan bahwa demokrasi deliberatif mensyaratkan inklusivitas, kesetaraan hak partisipasi, dan kebebasan dalam mengemukakan gagasan. Praktik demokrasi deliberatif tersebut merupakan bentuk dari watak

kewarganegaraan (*civic disposition*) yang berperan penting dalam membentuk warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*) serta sikap dewasa dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Damayana et al., 2024, hlm. 1413).

Pendekatan demokrasi deliberatif menjadi relevan dalam penguatan pendidikan demokrasi karena menekankan dialog rasional, kesetaraan partisipasi, dan pengambilan keputusan melalui musyawarah. Nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi aktif, sikap saling menghargai, tanggung jawab kolektif, dan musyawarah perlu dibiasakan dalam kehidupan sekolah sebagai landasan pembelajaran demokrasi. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan secara konkret melalui berbagai aktivitas sekolah, seperti Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), kegiatan ekstrakurikuler, dan kepanitiaan siswa, yang berfungsi sebagai ruang praktik demokrasi sehari-hari (Rasmanah et al., 2025, hlm. 46). Melalui pengalaman tersebut, siswa tidak hanya memahami demokrasi secara konseptual, tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan sosial, sehingga berkontribusi pada karakter kewarganegaraan. Karakter kewarganegaraan tersebut menjadi fondasi utama bagi generasi muda dalam mempersiapkan diri untuk menjalankan peran-peran strategis di masa depan (Anggraeni, 2024, hlm. 53).

Namun kenyataannya, kualitas demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang serius. Laporan *Democracy Index 2023: Age of Conflict* yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-56 dengan skor 6,53, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang memperoleh skor 6,71, sehingga dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat (*flawed democracy*) (Camerling, 2025, hlm. 60). Kondisi ini mengindikasikan melemahnya kualitas demokrasi dalam kehidupan bernegara. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga dapat ditemukan dalam lingkup pendidikan, termasuk di lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil observasi awal, praktik demokrasi deliberatif di lingkungan sekolah belum berjalan secara optimal yang ditandai dengan rendahnya partisipasi siswa dalam diskusi pembelajaran, kecenderungan pasif dalam proses musyawarah kelompok, serta minimnya keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat. Beberapa siswa juga mengungkapkan adanya hambatan seperti rasa takut melakukan kesalahan, keterbatasan waktu, dan kurangnya kepercayaan diri.

Hal ini menunjukkan bahwa siswa belum mampu memanfaatkan pembelajaran di kelas sebagai sarana belajar praktik demokrasi yang ideal. Akibatnya, perkembangan keterampilan berpikir kritis, berdiskusi, dan mengambil keputusan kolektif berpotensi menjadi kurang maksimal. Jika kondisi ini dibiarkan, pembentukan karakter demokratis siswa dapat terhambat sehingga tujuan Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas sulit tercapai.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji peran organisasi siswa dalam pembentukan karakter kewarganegaraan. Julaeha et al. (2021) menunjukkan bahwa keaktifan siswa dalam kepengurusan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) memiliki hubungan positif dengan pembentukan *civic disposition*. Selanjutnya, Insan et al. (2022) menegaskan bahwa OSIS berperan sebagai sarana strategis dalam penanaman

nilai-nilai demokrasi di tingkat sekolah menengah. Sementara itu, Saddawiyah et al. (2024) mengkaji praktik demokrasi deliberatif dalam konteks organisasi mahasiswa, yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip deliberasi dapat diterapkan dalam kehidupan organisasi sebagai bagian dari pembelajaran demokrasi.

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menelaah penerapan demokrasi deliberatif dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), masih terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam strategi konkret yang dilakukan OSIS dalam menguatkan praktik demokrasi deliberatif sebagai bagian dari pembentukan *civic disposition* siswa, termasuk faktor-faktor yang menghambat implementasinya di lingkungan sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan yang perlu dikaji lebih lanjut terkait penguatan demokrasi deliberatif pada organisasi siswa di jenjang SMK.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji praktik demokrasi deliberatif pada organisasi sekolah. Penelitian ini penting dilakukan guna menganalisis strategi penguatan nilai-nilai demokrasi deliberatif yang ada pada OSIS di SMK Negeri 2 Karanganyar sebagai perwujudan *civic disposition* siswa. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengambil judul "Strategi Penguatan Demokrasi Deliberatif pada OSIS Sebagai Bentuk *Civic Disposition*: Studi SMK Negeri 2 Karanganyar".

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam praktik demokrasi deliberatif dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Penelitian dilaksanakan di OSIS SMK Negeri 2 Karanganyar yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso, Jengglong, Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena penelitian secara alamiah dan mendalam (Sugiyono, 2023, hlm. 361). Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data (Wibowo, 2021, hlm. 87). Pendekatan kualitatif juga menekankan pemaknaan terhadap fenomena sosial yang meliputi persepsi, perilaku, tindakan, dan motivasi subjek penelitian, serta mendeskripsikannya secara komprehensif dalam bentuk narasi sesuai dengan kondisi alamiah (Fiantika et al., 2022, hlm. 5). Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Pemilihan informan didasarkan pada anggapan bahwa pihak-pihak tersebut memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kegiatan (Sugiyono, 2023, hlm. 400). Informan dalam penelitian ini meliputi pembina OSIS sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi, ketua dan wakil ketua OSIS sebagai pemegang peran kepemimpinan, pengurus OSIS sebagai pelaksana program kerja, serta anggota OSIS untuk memperoleh perspektif yang lebih beragam terkait praktik demokrasi deliberatif dalam organisasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali pandangan

dan pengalaman informan terkait praktik demokrasi deliberatif dalam OSIS. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung dinamika partisipasi dan proses pengambilan keputusan dalam kegiatan organisasi, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen-dokumen pendukung, seperti struktur organisasi, program kerja, dan notulen rapat. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi pada sumber yang sama, sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan mengenai topik yang sama (Sugiyono, 2023, hlm. 432). Analisis data dilakukan secara interaktif dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Proses analisis data berlangsung secara terus-menerus hingga data dinyatakan jenuh dan mencakup empat tahapan, yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*) (Sugiyono, 2023, hlm. 436-447). Melalui tahapan tersebut, data dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan temuan penelitian yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi OSIS SMK Negeri 2 Karanganyar dalam penguatan demokrasi deliberatif sebagai bentuk civic disposition

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi OSIS SMK Negeri 2 Karanganyar dalam penguatan demokrasi deliberatif sebagai bentuk civic disposition dianalisis melalui tiga komponen, yaitu penetapan tujuan organisasi, penyusunan program kerja, dan alokasi sumber daya. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan menjadi sarana pembelajaran demokrasi deliberatif bagi siswa dalam lingkungan OSIS di sekolah.

1) Pertama, strategi pada proses penetapan tujuan organisasi.

Penetapan visi dan misi OSIS tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui tahapan partisipatif yang melibatkan siswa dengan pendampingan pembina. Proses ini memberi ruang bagi siswa untuk memahami arah organisasi sekaligus menilai kesesuaian visi dan misi kandidat pemimpin OSIS dengan kebutuhan bersama. Pembina OSIS menegaskan bahwa pembentukan dan pengelolaan OSIS sejak awal dimaksudkan sebagai media pembelajaran demokrasi. Sebagaimana disampaikan: "Pada dasarnya ketika OSIS mau dibentuk itu kan tujuan daripada kesiswaan, saya selaku pembina OSIS ya... memberikan pembelajaran kepada anak-anak dalam proses demokrasi. Dalam upaya penguatan belajar demokrasi, di situ dia diajarkan untuk apa, memilih wakil-wakil yang dia kehendaki, yang sesuai dengan visi misi mereka, terus yang sesuai dengan pilihan mereka" (Wawancara Informan, 12 Desember 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa penetapan tujuan organisasi menjadi wahana pembentukan sikap keterbukaan, penghargaan terhadap perbedaan pandangan, serta kesadaran akan kepentingan bersama.

Berdasarkan temuan penelitian, strategi penguatan demokrasi deliberatif pada OSIS SMK Negeri 2 Karanganyar sebagai bentuk *civic disposition* dalam penetapan tujuan organisasi diwujudkan dengan adanya keterbukaan dalam proses peninjauan visi dan misi organisasi serta seleksi pembentukan kepengurusan.

Mekanisme ini ditunjukkan melalui penyampaian visi dan misi kepada perwakilan kelas, pelaksanaan debat terbuka, serta penyebaran informasi melalui media sosial OSIS. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hafizin & Herman (2024), yang menyatakan bahwa visi dan misi organisasi pendidikan merupakan suatu nilai dan tujuan yang hendak dicapai sehingga perlu pengawasan serta keterlibatan anggota organisasi. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya keterbukaan dalam forum dan sesuai dengan prinsip demokrasi deliberatif yang menekankan kebebasan mengajukan topik ataupun gagasan (Toha, 2024). Kegiatan ini juga menjadi wujud *civic disposition*, khususnya pada indikator *self discipline*, hadir tepat waktu dan mengikuti kegiatan sampai akhir, serta *open-mindedness*, adanya keterbukaan terhadap gagasan sebelum menyampaikannya kembali ke kelas (Zulaikah et al., 2023, hlm. 319).

Selain keterbukaan peninjauan visi dan misi, strategi penguatan demokrasi deliberatif juga tercermin dalam seleksi pembentukan kepengurusan OSIS. Berdasarkan temuan penelitian, proses ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui pertimbangan bersama terhadap kemampuan calon pengurus. Langkah ini memberi kesempatan yang relatif setara bagi siswa untuk terlibat dalam kepengurusan OSIS sesuai dengan kapasitas masing-masing. Mekanisme seleksi yang inklusif ini selaras dengan prinsip demokrasi deliberatif, di mana setiap individu diberi ruang untuk belajar menyampaikan pendapat secara rasional dan mendengarkan pandangan orang lain dalam pengambilan keputusan (Fariyah & Wahyuni, 2015, hlm. 39). Pernyataan tersebut sesuai dengan prinsip *open-mindedness*, yaitu keterbukaan dan kemampuan berpikir kritis dalam mengambil keputusan diskusi. Sikap ini merupakan bentuk dari *civic disposition* (Zulaikah et al., 2023, hlm. 319)

2) Kedua, strategi pada penyusunan program kerja.

Penyusunan program kerja dilaksanakan melalui mekanisme rapat berjenjang yang melibatkan seluruh pengurus tanpa pengecualian. Proses ini *memungkinkan* terjadinya pertukaran gagasan, penyampaian pendapat secara terbuka, serta pencarian kesepakatan bersama melalui musyawarah mufakat. Ketua Umum OSIS menyampaikan bahwa dalam pembahasan program kerja, setiap anggota memiliki hak yang sama untuk berpendapat tanpa dibedakan berdasarkan jabatan. Hal tersebut ia ditegaskan sebagai berikut: "Tentunya setiap anggota mendapatkan hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, dalam mereka berpendapat mereka sama pak, jadi saya tidak memilih-milih atau memberikan kesempatan yang berbeda antara pengurus inti yang memiliki jabatan yang tinggi dengan pengurus biasa" (Wawancara Informan, 11 Desember 2025). Dengan demikian, penyusunan program kerja tidak hanya berorientasi pada hasil kegiatan, tetapi juga berfungsi sebagai proses pembelajaran deliberasi yang menanamkan nilai toleransi, kesetaraan, dan tanggung jawab kolektif.

Berdasarkan temuan penelitian strategi penguatan demokrasi deliberatif pada OSIS SMK Negeri 2 Karanganyar sebagai bentuk *civic disposition* dalam penyusunan program kerja OSIS SMK Negeri 2 Karanganyar dilaksanakan melalui adanya rapat partisipatif mengutamakan prosedur musyawarah serta upaya menjaga kedisiplinan dalam rapat. Proses rapat partisipatif, berdasarkan temuan penelitian dimaknai sebagai keterlibatan dalam menyampaikan gagasan, menanggapi usulan, serta

mempertimbangkan pendapat pihak lain dalam forum rapat yang ada. Pelaksananya tercermin dalam rapat osis, sosialisasi pemilihan ketua osis, debat terbuka, hingga rapat *clasmeeeting*. Temuan tersebut mendukung prinsip demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya ruang demokrasi sebagai wadah belajar bersama, di mana perlu saling mendengarkan dan mencari solusi melalui musyawarah kolektif (OECD, 2021, hlm. 5). Kemampuan mendengarkan dalam rapat maupun diskusi tersebut mencerminkan *open-mindedness* sebagai bentuk dari *civic disposition* (Zulaikah et al., 2023, hlm. 319).

Perbedaan pandangan diselesaikan melalui musyawarah mufakat sebagai cara utama, sedangkan voting digunakan sebagai pilihan terakhir apabila kesepakatan tidak tercapai. Temuan ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam OSIS mengutamakan proses dialog dan pertimbangan bersama sebelum menentukan hasil akhir (Sholikin, 2021). Proses diskusi tersebut juga didukung oleh kedisiplinan pelaksanaan rapat yang berlangsung sesuai waktu dan agenda yang telah disepakati, sehingga musyawarah dapat berjalan tertib dan efektif. Praktik ini berperan dalam membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab siswa (Triaswari et al., 2024, hlm. 394). Kedisiplinan dalam musyawarah juga mencerminkan *civic disposition*, khususnya disiplin diri sebagai kemampuan mematuhi aturan dan mengatur diri dalam forum bersama (Zulaikah et al., 2023, hlm. 319).

3) Ketiga, strategi dalam proses alokasi sumber daya.

Alokasi sumber daya dilakukan melalui musyawarah dengan diawali pembentukan panitia kecil dan pembagian tugas secara merata. Ketua Umum OSIS menyampaikan bahwa: "Tentunya kita saling berbagi tugas, jadi dalam menyusun atau melaksanakan sebuah program kerja kita tidak hanya mengandalkan anggota dari divisi tersebut, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anggota lain untuk berkembang di bidang tersebut" (Wawancara Informan, 11 Desember 2025). Pernyataan tersebut diperkuat oleh Pembina OSIS yang menyatakan: "Dalam setiap proses, tidak lepas dari pembentukan panitia kecil dulu, karena tanpa membentuk panitia program itu tidak bisa berjalan dengan baik... karena di situ untuk menentukan siapa saja yang kerja di bagian ini dan bagian itu, supaya pembagiannya bisa merata" (Wawancara Informan 1, 12 Desember 2025). Praktik ini menunjukkan bahwa alokasi sumber daya dimaknai sebagai sarana pemerataan kesempatan belajar demokrasi dan penguatan sikap tanggung jawab bersama.

Berdasarkan temuan penelitian, alokasi sumberdaya dalam penguatan demokrasi deliberatif dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah, pemerataan kesempatan belajar bagi siswa, serta dukungan dari pihak sekolah. Mekanisme musyawarah dalam pembagian tugas terlihat dari proses pembentukan panitia kecil pada setiap program kerja OSIS. Hal ini sejalan dengan pendapat Rivai et al. (2024, hlm. 59), yang menyatakan bahwa organisasi perlu struktur yang jelas, termasuk pembentukan panitia untuk memastikan tugas terkelola dengan baik dan sumber daya dimanfaatkan optimal. Hal ini tercermin dalam rapat persiapan Pemilihan Ketua OSIS yang membahas penjadwalan kegiatan, penetapan petugas seperti moderator, serta kesepakatan mekanisme debat terbuka yang melibatkan siswa.

Selanjutnya, aspek pemerataan kesempatan belajar dimaknai sebagai upaya memberikan peluang yang setara bagi seluruh siswa dalam program kerja OSIS. Temuan penelitian menunjukkan adanya keterbukaan dalam pembagian tugas, yang ditunjukkan melalui pelibatan siswa kelas X dalam kepanitiaan Pemilihan Ketua OSIS (MILKOI). Pelibatan ini dilakukan karena siswa kelas XI dan XII telah memiliki pengalaman sebelumnya, sehingga siswa kelas X diberi kesempatan untuk belajar dan memperoleh pengalaman demokrasi secara bertahap. Keterlibatan tersebut memberikan ruang bagi siswa untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan secara rasional, bukan sekadar berdasarkan opini subjektif (Farihah & Wahyuni, 2015, hlm. 39). Selain itu, dukungan pihak sekolah juga berperan penting, yang diwujudkan melalui pemberian izin penggunaan fasilitas sekolah, dispensasi jam pelajaran bagi pengurus OSIS, serta persetujuan administratif terhadap program kerja. Dukungan yang memadai ini menjadi faktor strategis bagi pengembangan potensi siswa. (Alwi & Pratama, 2025).

Faktor penghambat penguatan demokrasi deliberatif dalam lingkungan OSIS SMK Negeri 2 Karanganyar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan demokrasi deliberatif di lingkungan OSIS SMK Negeri 2 Karanganyar masih menghadapi berbagai hambatan, yang tercermin pada aspek minat partisipasi siswa, dominasi kekuasaan, dan komitmen deliberasi. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan memengaruhi kualitas pelaksanaan demokrasi deliberatif di lingkungan sekolah.

1) Pertama, faktor penghambat pada aspek minat partisipasi siswa.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi siswa dalam kegiatan OSIS, khususnya forum deliberatif seperti debat terbuka MILKOI, masih didominasi oleh kehadiran formal tanpa keterlibatan aktif. Pembina OSIS menyampaikan bahwa dalam kegiatan debat masih banyak siswa yang mengobrol atau bermain gawai meskipun secara fisik hadir dalam forum. Sebagaimana disampaikan: "Walaupun dia itu bermain HP dan ngobrol sendiri, itu sudah merupakan salah satu bentuk keterlibatan mereka" (Wawancara Informan 1, 12 Desember 2025). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi siswa belum sepenuhnya dimaknai sebagai keterlibatan substantif dalam proses deliberasi.

Rendahnya minat partisipasi juga tercermin dari sikap apatis sebagian siswa yang hanya hadir karena dorongan eksternal. Salah satu informan menyatakan bahwa siswa sering kali harus "dioyak-oyak dulu" agar mau terlibat dalam kegiatan (Wawancara Informan, 12 Desember 2025). Selain itu, suasana forum yang kurang kondusif, seperti adanya ejekan atau sorakan terhadap pendapat tertentu, turut menurunkan keberanian siswa untuk berpartisipasi. Seorang siswa mengungkapkan: "Kalau visi misi tidak sealur... pasti akan disorakin... itu akan membuat yang bilang itu *ngedown*" (Wawancara Informan, 11 Desember 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya minat partisipasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal siswa, tetapi juga oleh iklim forum yang belum sepenuhnya mendukung praktik deliberatif yang sehat.

Berdasarkan temuan penelitian, faktor penghambat penguatan demokrasi deliberatif di lingkungan OSIS SMK Negeri 2 Karanganyar pada aspek minat

partisipasi terletak pada rendahnya keterlibatan siswa secara aktif dalam proses musyawarah serta pengambilan keputusan. Keterlibatan aktif ini tidak sekadar ditunjukkan melalui kehadiran fisik, melainkan juga melalui keberanian menyampaikan pendapat, memberikan tanggapan, serta berpartisipasi dalam pembahasan diskusi. Namun, berdasarkan temuan penelitian, partisipasi siswa masih cenderung bersifat pasif. Kondisi ini dilihat dari dominasi kehadiran yang bersifat formalitas, rendahnya ketertarikan siswa terhadap isu yang dibahas, serta lingkungan forum yang kurang mendukung.

Dominannya kehadiran formal menunjukkan bahwa keterlibatan siswa masih bersifat seremonial, baik melalui sistem perwakilan kelas maupun jumlah kehadiran dalam kegiatan. Meskipun siswa hadir dalam forum, sebagian belum menunjukkan perhatian dan partisipasi aktif, yang terlihat dari perilaku mengobrol atau bermain gawai selama musyawarah berlangsung. Kondisi ini menjadi hambatan karena tidak sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif yang menekankan partisipasi aktif melalui musyawarah dan pertukaran gagasan untuk memahami permasalahan secara bersama (Fariyah & Wahyuni, 2015, hlm. 39). Selain itu, rasa malu dan takut menyampaikan pendapat juga menjadi faktor penghambat keterlibatan siswa. Situasi tersebut membatasi keberanian siswa untuk berpartisipasi secara lebih aktif dalam forum, sehingga proses deliberasi belum berlangsung secara optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Cahyono et al. (2017) yang menunjukkan bahwa rendahnya kepercayaan diri dan rasa malu merupakan kendala dalam pelaksanaan demokrasi di lingkungan sekolah.

2) Kedua, faktor penghambat berikutnya berkaitan dengan dominasi kekuasaan.

Secara normatif, OSIS dipandang sebagai ruang yang setara tanpa memandang jabatan atau senioritas. Ketua Umum OSIS menyampaikan: "Pasti setiap suara itu didengar pak, tapi jarang siswa menyampaikan suaranya kalau tidak ditanya" (Wawancara Informan, 11 Desember 2025). Ketua 1 OSIS mengungkapkan bahwa pengurus senior cenderung lebih dominan dalam menyampaikan pendapat karena suaranya lebih didengar, sehingga membuat anggota lain enggan berpendapat (Wawancara Informan, 12 Desember 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat pembatasan formal dalam berpendapat, persepsi hierarki dan relasi kuasa tetap memengaruhi keberanian siswa dalam proses deliberasi.

Berdasarkan temuan penelitian, faktor penghambat penguatan demokrasi deliberatif di lingkungan OSIS SMK Negeri 2 Karanganyar pada aspek dominasi kekuasaan terletak pada pengaruh jabatan dan persepsi hierarki dalam organisasi. Dominasi ini terlihat dari kecenderungan sebagian siswa bersikap pasif dalam forum musyawarah, seperti memilih diam atau mengikuti pendapat pengurus yang lebih senior karena dipengaruhi oleh perbedaan posisi dan pengalaman berorganisasi. Temuan ini sejalan dengan pendapat Insani et al. (2023) yang menyatakan bahwa dominasi elit dapat mempersempit ruang partisipasi setara dalam demokrasi deliberatif.

Berdasarkan temuan penelitian, keberadaan anggota senior tidak menunjukkan dominasi yang bersifat otoriter atau membatasi, melainkan berperan sebagai pemberi arahan dan bimbingan berdasarkan pengalaman organisasi yang

dimiliki. Namun demikian, meskipun secara prosedural forum musyawarah telah berlangsung secara egaliter, dalam praktiknya pendapat anggota senior cenderung lebih diperhatikan dibandingkan anggota lainnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dominasi tidak hadir dalam bentuk pembatasan langsung terhadap hak berbicara, tetapi muncul melalui persepsi hierarki dan rasa segan terhadap anggota yang lebih senior. Akibatnya, sebagian siswa masih merasa ragu untuk menyampaikan pendapat, sehingga relasi kuasa secara tidak langsung memengaruhi tingkat keberanian berpartisipasi dalam musyawarah. Fenomena ini sejalan dengan pandangan Hidayat (2025) yang menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa dominasi elit dan belum optimalnya partisipasi yang bermakna.

3) Ketiga, faktor penghambat pada aspek komitmen deliberasi.

Komitmen ini tercermin dari kedisiplinan mengikuti agenda musyawarah, kesungguhan membahas isu, serta kedalaman diskusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan waktu menjadi salah satu hambatan utama dalam pendalaman deliberasi. Salah satu informan menyampaikan: "Kemarin saya mengikuti agenda debat terbuka ada siswa yang berpendapat dan bertanya, namun karena terbatasnya waktu ada siswa yang tidak mempunyai kesempatan bertanya. Mungkin juga ada siswa yang merasa jawabannya kurang tepat dan kurang percaya diri dalam menyampaikan (Wawancara Informan, 15 Desember 2025). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa ada keterbatasan waktu dan rendahnya kepercayaan diri yang membatasi kesempatan siswa untuk menyampaikan pendapat.

Berdasarkan temuan penelitian, faktor penghambat penguatan demokrasi deliberatif di lingkungan OSIS SMK Negeri 2 Karanganyar pada aspek komitmen deliberasi terletak pada pengalaman mengikuti forum, keterbatasan waktu musyawarah serta rendahnya kepercayaan diri sebagian siswa dalam berpartisipasi aktif.

Komitmen deliberasi dalam penelitian ini dimaknai sebagai kesungguhan pengurus dan anggota OSIS dalam mengikuti seluruh tahapan musyawarah. Berdasarkan temuan penelitian, keberanian berpendapat masih dipengaruhi oleh pengalaman siswa dalam mengikuti forum. Minimnya pengalaman berdampak pada kesiapan mental, sehingga siswa merasa ragu dan khawatir pendapatnya kurang tepat, yang akhirnya membuat mereka memilih diam. Hambatan internal tersebut diperkuat oleh faktor eksternal berupa keterbatasan waktu musyawarah yang membatasi kesempatan siswa untuk berpartisipasi. Permasalahan ini sejalan dengan Nurul Laela (2022) yang menjelaskan bahwa faktor internal berasal dari kondisi individu, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan.

Meskipun demikian, siswa cenderung merasa lebih nyaman dan bebas menyampaikan pendapat dalam lingkungan organisasi dibandingkan di kelas yang membuatnya lebih pasif. Perbedaan tingkat kenyamanan ini tidak menunjukkan kegagalan praktik deliberasi di OSIS, melainkan mencerminkan pengaruh pengalaman, lingkungan, dan faktor personal siswa dalam berpartisipasi. Hal ini sejalan dengan Cahyono et al. (2017) yang menyatakan bahwa hambatan psikologis, seperti rasa malu dan kurangnya kepercayaan diri, merupakan tantangan dalam

organisasi sekolah. Oleh karena itu, OSIS berperan sebagai ruang pembelajaran demokrasi yang memungkinkan proses deliberasi tetap berlangsung dan membantu siswa mengatasi hambatan internal tersebut, meskipun tingkat partisipasi belum sepenuhnya setara.

Selanjutnya, ditemukan adanya ketidakteraturan kehadiran dan keterlambatan sebagian siswa dalam mengikuti agenda musyawarah. Kondisi ini terlihat saat debat terbuka berlangsung, di mana beberapa peserta tidak memperhatikan forum, bermain gawai, atau meninggalkan kegiatan sebelum selesai. Situasi tersebut menunjukkan bahwa kedisiplinan dan komitmen deliberasi siswa terhadap kesepakatan bersama masih belum optimal. Perilaku ini menunjukkan bahwa siswa menyadari hak untuk hadir, tetapi belum sepenuhnya menjalankan kewajiban untuk mengikuti musyawarah secara aktif hingga selesai, sehingga makna deliberasi menjadi berkurang. Temuan ini sejalan dengan Murdianto et al. (2025) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi politik dan pemahaman hak serta kewajiban menjadi penghambat terciptanya deliberasi yang inklusif dan bermakna, karena kehadiran fisik tidak selalu diikuti keterlibatan yang sungguh-sungguh dalam forum.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi OSIS dalam penguatan demokrasi deliberatif sebagai bentuk *civic disposition* di SMK Negeri 2 Karanganyar dilaksanakan melalui tiga komponen utama, yaitu penetapan tujuan organisasi, penyusunan program kerja, dan alokasi sumber daya. Penetapan tujuan organisasi dilakukan melalui keterbukaan dalam penyampaian dan peninjauan visi dan misi, debat terbuka, serta pelibatan perwakilan siswa, sehingga memberi ruang bagi siswa untuk memahami arah organisasi dan menghargai perbedaan pandangan. Penyusunan program kerja dilaksanakan melalui rapat partisipatif yang mengutamakan musyawarah mufakat, kesetaraan kesempatan berpendapat, dan kedisiplinan dalam forum, sehingga menjadi sarana pembelajaran dialog, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan bersama. Sementara itu, alokasi sumber daya dilakukan melalui musyawarah dalam pembentukan panitia dan pembagian tugas secara merata, termasuk pelibatan siswa kelas X serta dukungan fasilitas dari pihak sekolah, sehingga memberikan kesempatan belajar demokrasi secara langsung dan bertahap. Secara keseluruhan, strategi tersebut menunjukkan bahwa OSIS berperan sebagai ruang pembelajaran demokrasi yang membentuk sikap terbuka, disiplin, dan tanggung jawab sebagai bagian dari *civic disposition* siswa. Namun demikian, penguatan demokrasi deliberatif tersebut masih menghadapi hambatan pada aspek minat partisipasi, dominasi kekuasaan, dan komitmen deliberasi. Hambatan pada minat partisipasi terlihat dari keterlibatan siswa yang masih didominasi kehadiran formal tanpa partisipasi aktif, serta dipengaruhi oleh rendahnya minat, rasa malu, dan lingkungan forum yang belum sepenuhnya kondusif. Hambatan pada aspek dominasi kekuasaan muncul melalui pengaruh jabatan dan persepsi hierarki, di mana pendapat anggota senior cenderung lebih diperhatikan sehingga sebagian siswa merasa ragu untuk menyampaikan pendapat. Sementara itu, hambatan pada komitmen deliberasi ditunjukkan oleh keterbatasan waktu musyawarah, rendahnya

kepercayaan diri, serta ketidakteraturan kehadiran dan perhatian siswa dalam forum, yang menyebabkan proses deliberasi belum berlangsung secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa, menciptakan iklim musyawarah yang lebih inklusif, serta memperkuat kesiapan dan komitmen siswa dalam forum deliberasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak strategi demokrasi deliberatif terhadap pembentukan *civic disposition* siswa secara lebih mendalam dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alwi, H., & Pratama, M. A. N. (2025). Peran manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kompetensi siswa pada organisasi siswa intra sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 4049–4059.
- Cahyono, B., Sudarmanto, R. G., & Sinaga, R. M. (2017). Budaya demokrasi pada organisasi siswa intra sekolah (OSIS). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 111, 1–10.
- Hafizin, & Herman. (2024). Merumuskan visi dan misi lembaga pendidikan. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 5(1), 99–110. <https://doi.org/10.30868/im.v5i01.2024>
- Hidayat, S. (2025). Demokrasi di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 3(1), 1–8.
- Insani, M. D. N., Nelfa, P. A. R., & Utaman, M. L. (2023). Analisis peran kompetensi sebagai mediator deliberatif melalui kolaborasi multi-stakeholder. *Jurnal Manajemen Strategis*, 7(2), 46–60.
- Murdianto, R. B., Alamsyah, M. N., & Pemuda, T. (2025). Demokrasi deliberatif dalam musyawarah rencana pembangunan desa. *Jurnal Demokrasi dan Partisipasi Publik*, 1(4), 204–216.
- Sholikin, A. (2021). Kajian model demokrasi: Teori dan paradigma. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(2), 168–184. <https://doi.org/10.52166/madani.v13i02.2693>
- Toha, L. I. (2024). Kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam perspektif demokrasi deliberatif Jurgen Habermas. *Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*, 17(1), 13–23.
- Triaswari, F. D., Sutrisno, S., & Asmaroini, A. P. (2024). Implementasi civic disposition peserta didik di kurikulum merdeka. *Academy of Education Journal*, 15(1), 390–398. <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2201>
- Zulaikah, Z., Nurwahidin, M., & Yulianti, D. (2023). Strategi pembelajaran flipped classroom untuk meningkatkan keterampilan civic disposition siswa. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 8(2), 318–325. <https://doi.org/10.33394/jtp.v8i2.6444>
- Hardiman, F. B. (2019). *Demokrasi deliberatif: Menimbang negara hukum dan ruang publik dalam teori diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rivai, N. I., Akhyari, Basalamah, E., Hadi, R. S., & Armauliza. (2024). *Teori organisasi*. Bandung: Tahta Media Group.